

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang selalu diusahakan pencapaiannya oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor pertanian berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, perbaikan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Hasil akhir yang hendak dicapai dari pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat petani dan masyarakat umum (Tambunan, 2010; Yuwono, 2011; Meier, 1995).

Salah satu aspek penentu tercapainya tujuan pembangunan pertanian adalah pendidikan pembangunan (Mosher, 1996) untuk pelaku utama yang lebih dikenal dengan nama penyuluhan pertanian (Ban & Hawkins, 1999). Dalam hal ini, penyuluhan pertanian berkepentingan untuk meningkatkan kompetensi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha pertanian melalui proses pendidikan luar sekolah (non formal) yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Penyuluhan pertanian dapat juga menjadi syarat pelancar pembangunan pertanian, sebagai variabel antara dalam pembangunan pertanian, menjadi penghubung antara pengambil keputusan (birokrat, peneliti, produsen) dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, komunikasi untuk inovasi pedesaan, dan proses pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian (Mardikanto, 2009; Leeuwis, 2009; Timmer, 1983; Lionberger, 1983).

Tahap awal yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian di Indonesia adalah melaksanakan kegiatan perencanaan penyuluhan pertanian untuk menghasilkan dokumen program penyuluhan pertanian sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatannya. Perencanaan tersebut dirumuskan oleh banyak pihak, terutama oleh penyuluh pertanian bersama-sama dengan petani berdasarkan fakta dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan, penyuluh pertanian diharapkan dapat mengorganisir pengambilan keputusan tentang situasi, masalah, tujuan, memanfaatkan sumberdaya, menyusun skenario program dan kegiatan dan cara mencapai tujuan penyuluhan pertanian.

(Kementan, 2016; Dirlanudin, 2011; Suparta, Sutrisna & Nuraini, 2009; Kay & Alder, 1999; Mardikanto, 1993; Tjokroamidjojo, 1985; Conyer & Hill, 1984).

Dalam pelaksanaannya, penyuluh pertanian diminta untuk menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif dalam menyusun rencana program dan kegiatan penyuluhan pertanian. Oleh karena itu, hirarki proses penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian di Indonesia diawali dari tingkat desa / Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dan berakhir pada tingkat pemerintah pusat. Peran serta petani secara langsung dibutuhkan pada tingkat desa. Petani yang terlibat merupakan perwakilan dari kelompok tani yang berada pada masing-masing WKPP. Dalam hal ini petani telah diposisikan sebagai subjek yang dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi, data dan pengambilan keputusan perencanaan penyuluhan pertanian (RI, 2006; Deptan, 2009; Kementan, 2016).

Melalui pendekatan perencanaan partisipatif, dibutuhkan partisipasi petani pada prosesnya. Khususnya untuk menggali data dan informasi nagari (desa), penyuluh pertanian disarankan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada masyarakat (petani) sebagai pelaku aktif atau subjek dalam mengambil inisiatif, melaksanakan proses dan aksi tindak (Daniel *et al*, 2005). Partisipasi petani juga dibutuhkan untuk menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai bahan penetapan keadaan dalam dokumen perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari (desa). Adanya partisipasi petani dalam menyusun RDKK, dapat mengakomodir kebutuhan anggota kelompok tani selama satu tahun berjalan dengan harapan dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas usaha taninya. Kondisi tersebut memperlihatkan kedudukan perencanaan penyuluhan pertanian yang disusun dengan pendekatan partisipatif untuk membantu pelaku utama (petani) mencapai tujuan usaha taninya lebih maksimal.

Pendekatan partisipatif yang digunakan pada perencanaan penyuluhan pertanian merupakan hasil perkembangan teori perencanaan yaitu dari paradigma *rasionalitas instrumental* ke *communicative turn in planning*. Semenjak itu berkembangnya model perencanaan yang menekankan perlunya proses dialog (komunikasi), partisipasi, kolaborasi dan penciptaan konsensus (Healey, 1987;

Friedman, 1987). Model perencanaan tersebut meyakinkan bahwa semakin penting aspek sosial dipertimbangkan dalam perencanaan untuk pencapaian tujuan yang lebih efektif. Perkebangan teori perencanaan kearah *communicative turn in planning* membuat hubungan timbal balik antara modal sosial dengan perencanaan (Masik, 2005) .

Dari sudut pandang perencanaan partisipatif, partisipasi petani dapat meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan penyuluhan pertanian. Partisipasi petani dapat menjadi alat untuk mengorganisir persetujuan dan dukungan individu serta kelompok tani dalam mengambil keputusan perencanaan (Rustiadi *et al*, 2011; Uphoff, Cohen & Goldsmith, 1979). Oleh karena itu partisipasi petani menjadi isu strategis dalam perencanaan penyuluhan pertanian saat ini.

Akan tetapi, kondisi partisipasi petani pada proses perencanaan penyuluhan pertanian berada pada tingkat yang masih rendah. Seperti yang ditemukan oleh Agustiar (2012) dan Reza (2016) menyatakan bahwa masih rendahnya partisipasi petani pada proses perencanaan penyuluhan pada beberapa WKPP di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Anis *et al* (2014) menyatakan bahwa partisipasi petani masih sangat rendah pada penyusunan Rencana Defenitif Kelompok (RDK)/Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Desa Tapada'a Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Tentunya kondisi tersebut menjadi penghambat dalam penerapan pendekatan partisipatif pada perencanaan penyuluhan pertanian.

Fakta empiris di atas menunjukkan perlunya perbaikan partisipasi petani pada proses perencanaan penyuluhan pertanian. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengimplementasia pendekatan partisipatif pada perencanaan penyuluhan pertanian. Dengan demikian hasil akhir dari perencanaan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh petani. Selain itu, petani juga merasa memimiliki dan bertanggung jawab terhadap keputusan perencanaan yang telah disusun secara bersama-sama.

Selama ini, penelitian tentang peningkatan partisi petani pada proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari (desa) belum ada dilakukan oleh

peneliti terdahulu. Fokus penelitian terdahulu baru sampai pada menjelaskan proses perencanaan program penyuluhan untuk program kewirausahaan (Dirlaludin, 2011), selanjutnya penelitian Arevin (2007) yang menjelaskan bahwa perencanaan dan rancangan program penyuluhan disusun dengan menggunakan basis masyarakat lokal untuk kegiatan penyuluhan sadar wisata, sedangkan Amanah (2003) menghasilkan penelitian bahwa perencanaan program penyuluhan perikanan dapat disusun dengan basis kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Keseluruhan penelitian terdahulu di atas, belum ada membahas tentang pemanfaatan modal sosial untuk meningkatkan partisipasi petani pada proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari (desa). Pada hal, modal sosial merupakan potensi yang dapat digunakan pada perencanaan yang menggunakan pendekatan partisipatif. Pernyataan tersebut diperkuat dengan perkembangan teori perencanaan yang telah memasukkan unsur sosial dan budaya sebagai salah satu modal non-materi untuk membantu terselenggaranya perencanaan pembangunan yang lebih baik (Putnam, 1993; Ife & Tesoriero, 2008; Masik, 2005).

Salah satu bentuk modal sosial yang dimiliki oleh petani dalam kelompok petani adalah jaringan sosial pada dimensi *bonding social capital*. Menurut Woolcock (2000) masyarakat yang termasuk kedalam kelompok *bonding social capital* umumnya berinteraksi secara intensif dan saling mendukung. Seperti yang diungkapkan dari hasil penelitian Dinas Peternakan Sumatera Barat (2012); Martiningsih (2012); Yenikawati *et al* (2015); Yumi *et al* (2012); Tarigan (2005); Saraswati (2016); dan Nasution (2002), menyatakan bahwa baiknya partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok karena adanya ikatan yang terbentuk oleh hubungan kekeluargaan, pertemanan, kesamaan agama, penerapan norma, nilai-nilai, kesamaan nasib, kesamaan suku. Egam & Rengkung (2014) juga menemukan bahwa tingginya partisipasi kelompok masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan suku batik pada perencanaan di Kelurahan Malalayang Kota Manado.

Pada dasarnya, modal sosial dalam bentuk jejaring sosial memiliki tiga dimensi, yaitu modal sosial yang mengikat (*bonding social capital*), menyambung (*bridging social capital*) dan mengait (*linking social capital*), akan tetapi penulis hanya terfokus pada modal sosial mengikat. Diduga bahwa dengan

dimasukkannya unsur *bonding social capital* sebagai salah satu dasar pembentukan kelompok tani, maka mampu memperbaiki partisipasi petani disetiap kegiatan kelompoknya terutama pada proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari. Meskipun kelompok masyarakat *bonding* memiliki kelemahan-kelemahan seperti perbedaan yang kuat antara “orang kami” dan orang luar; hanya ada satu alternatif jawaban; sulit menerima arus perubahan; kurang akomodatif terhadap pihak luar, namun mereka memiliki kelebihan yaitu mengutamakan kepentingan kelompok (Rustiadi *et al*, 2011) sebagai dasar terbentuknya partisipasi mereka dalam menjalankan aktifitas kelompoknya.

Selain itu, *bonding* merupakan hubungan ke dalam komunitas yang cenderung memunculkan eksklusifitas identitas dan kelompok homogen. Sedangkan *bridging* merupakan jejaring terbuka yang memberikan kesempatan pada anggota untuk berhubungan dengan kelompok lainnya. *Bonding social capital* merujuk kepada hubungan kerjasama dan saling percaya antara anggota-anggota sebuah jejaring, yang memiliki kesamaan sosio-demografis. *Bridging social capital* merujuk kepada hubungan-hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan antara orang-orang yang memiliki perbedaan sosio-demografis (atau identitas sosial), misalnya perbedaan usia, kelompok etnis, kelas sosial. *Bonding social capital* adalah suatu bentuk modal sosial yang memperhatikan kesamaan dan memungkinkan jaringan kerjasama antar anggota dalam kelompok dan antar anggota dalam suatu perkumpulan. *Bridging social capital* melihat hubungan anggota suatu kelompok dengan kelompok lain dan bukan hubungan dengan sesama anggota dalam kelompok yang sama. Hubungan dalam *bridging social capital* lebih longgar dibanding dengan hubungan dalam *bonding social capital*. Sedangkan modal sosial yang bersifat mengait (*linking social capital*) terbentuk dari hubungan formal antara berbagai pihak seperti lembaga politik, bank, sekolah pertanian, fakultas pertanian, dll (Putnam, 2000; Szreter & Woolcock, 2004; Narayan, 2002; Narayan & Cassidy, 2001).

Kajian ini tidak memasukkan unsur modal sosial menjembatani (*bridging social capital*) dan *linking social capital* dikarenakan kedua dimensi modal sosial tersebut tidak lagi menonjolkan ikatan yang dimiliki oleh anggota kelompok. Modal sosial menjembatani (*bridging social capital*) anggota

kelompoknya bersifat heterogen, bersifat individualistis, dan sudah menganut prinsip kebebasan, terbuka, dan mandiri (Hasbullah, 2006; Hasbullah, 2006; Poplin, 1972). Tipologi masyarakat *bridging social capital* dalam gerakannya lebih memberikan tekanan pada dimensi *fight for* dan pada keadaan tertentu jiwa gerakan lebih diwarnai oleh semangat *fight againts* yang bersifat memberi perlawanan terhadap ancaman berupa kemungkinan runtuhnya simbol-simbol dan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang dianut oleh kelompok masyarakat (Coleman, 1990). Begitu juga dimensi *linking social capital* yang lebih bersifat mengaitkan atau menciptakan hubungan antara lembaga.

Kelompok masyarakat *bonding* ternyata juga ditemukan pada wilayah penelitian ini yaitu di Kabupaten Lima Puluh Kota yang didominasi oleh masyarakat Minangkabau. Salah satu bentuk ikatan yang terdapat dalam kelompok itu adalah ikatan kekerabatan. Ciri khas sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah berdasarkan garis keturan ibu (*matrilineal*), bertalian darah (*geneologis*) dan masyarakat yang terikat oleh satu wilayah domisili dan memiliki hubungan keturunan yang lebih dikenal dengan sebutan *territorial*. Selanjutnya mereka membentuk kelompok kekerabatan yang terdekat disebut *saparuik*, pada saat kelompok ini mengalami perkembangan jumlah anggota, maka mereka berubah menjadi kelompok *sajurai*. Kelompok lainnya adalah *kampung* yaitu merupakan beberapa himpunan rumah yang berdekatan letaknya, selanjutnya kelompok masyarakat *sasuku* (Syahrizal & Meiyenti, 2012).

Sejalan dengan sistem kekerabatannya, masyarakat Minangkabau membentuk kelompok-kelompok kecil dalam menjalankan dan mengatasi permasalahan sehari-harinya, termasuk juga pada bidang pertanian. Mereka juga menerapkan norma, nilai serta falsafah dalam hidup bermasyarakat (Amir, 2001) yang berdampak pada terbentuknya hubungan keterikatan antara individu yang tidak bertali darah yaitu hubungan pertemanan akrab /persahabatan. Kumpulan dari masyarakat seperti ini juga membentuk kelompok tani untuk mengatasi permasalahan usahatani. Oleh karena itu, ikatan petani dalam kelompok tani bisa saja terbentuk oleh ikatan pertalian darah (*saparuik*, *sasuku*, *sapusako*) dan ikatan tidak bertali darah (pertemanan dekat/persahabatan, *urang sumando*), dimana anggota dalam kelompok ini berinteraksi secara intensif dan saling

mendukung. Ikatan yang kuat memungkinkan anggota kelompok tani mempunyai kesadaran tentang identitas kelompok dan tumbuh rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama (Hasbullah, 2006; Woolcock, 1998; Putman, 1993).

Hubungan modal sosial dengan partisipasi masyarakat juga ditemukan di negara lain, seperti Iowa, Silicon Valley, Amerika Latin, Canada, Denmark dan Polandia. Di negara tersebut, modal sosial dalam berbagai bentuk (jaringan, norma dan kepercayaan) memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat, baik itu dalam program pembangunan pedesaan, kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Salah satu bentuk modal sosial yang dilihat kaitannya dengan partisipasi adalah jaringan kerja masyarakat baik dari dimensi keterikatan (*bonding social capital*) ataupun hubungan masyarakat (Liu, Qiaoming, Besser, Terry, 2003; Brisson, Daniel; Usher, Charles L, 2005; Fernandes, Marylin; Nichols, Laura, 2002; Edward, Monica, Robert. A, 2009; Rustiadi *et al*, 2011). Temuan di Rwanda Afrika memanfaatkan berbagai dimensi modal sosial diantaranya adalah kerjasama dalam jaringan kerja untuk meningkatkan kerjasama antara petani pada desa berbeda (Rijn *et al*, 2015) dan latihan sosial yang dinamis berfungsi untuk memperkuat ikatan kelompok (Pretty & Bharucha, 2015).

Meskipun telah banyak bukti bahwa modal sosial dapat memperbaiki partisipasi masyarakat, namun pada kegiatan perencanaan penyuluhan pertanian belum ada yang terfokus untuk memanfaatkan *bonding social capital* yang terdapat dalam kelompok tani sebagai alat memperbaiki partisipasi petani. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang terfokus untuk menjawab mengapa dan bagaimana ikatan anggota kelompok tani dapat memperbaiki partisipasi anggotanya pada proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Salah satu daerah di Sumatera Barat yang telah menerapkan pendekatan partisipatif untuk perencanaan penyuluhan pertanian adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyuluh pertanian di setiap wilayah kerjanya, yaitu nagari, setiap tahun ditugaskan melakukan kegiatan perencanaan menyusun program penyuluhan pertanian nagari. Pedoman yang digunakan oleh penyuluh pertanian

adalah Permentan Nomor 25 Tahun 2009 yang mengamanatkan untuk menggunakan pendekatan partisipatif untuk menyusun programnya.

Akan tetapi, tidak semua penyuluh pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan partisipatif pada proses perencanaan penyuluhan pertanian. Alasan tidak diterapkan adalah masih rendahnya kesadaran petani untuk mau terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga partisipasi petani menjadi isu strategis untuk menerapkan pendekatan partisipatif pada proses perencanaan penyuluhan pertanian .

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di WKPP Nagari Balai Panjang dan Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota pada Desember 2015, petani yang memiliki partisipasi rendah, biasanya berasal dari kelompok tani yang tidak memiliki ikatan kuat antara anggota kelompok mereka. Kelompok ini merupakan kelompok tani hamparan yang hanya mengikat kelompoknya dengan kesamaan hamparan lahan pertanian. Kelompok tersebut pada umumnya dibentuk atas inisiatif pemerintah untuk memudahkan mereka merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan pembangunan pertanian kebanyakan membutuhkan lahan-lahan pertanian yang sehamparan.

Jika tidak dicarikan solusi untuk perbaikan partisipasi petani pada proses perencanaan penyuluhan pertanian, maka pendekatan partisipatif tidak dapat terealisasikan dengan baik. Merujuk pada perkembangan teori perencanaan yang telah memasukkan unsur sosial dalam perencanaan dan penelitian terdahulu yang telah membuktikan bahwa ada hubungannya antara partisipasi dengan modal sosial. Maka alternatif solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah modal sosial yang dimiliki petani dalam kelompok tani. Karena petani-petani yang dilibatkan pada proses perencanaan penyuluhan pertanian berasal dari beberapa kelompok tani yang berada pada WKPP.

Salah satu bentuk modal sosial yang dimiliki oleh kelompok tani adalah jejaring sosial pada dimensi *bonding social capital*. Sebagian kelompok tani yang ada beberapa WKPP di Kabupaten Lima Puluh Kota terbentuk oleh kumpulan petani yang memiliki ikatan pertalian darah (*saparuik, sasuku, sapusako*) dan ikatan tidak bertali darah (pertemanan dekat/persahabatan, *urang sumando*). Oleh

karena itu, perlu dilakukan penelitian yang komprehensi untuk membuktikan bahwa ikatan petani dalam kelompok tani dapat memperbaiki partisipasinya dan dapat membantu terlaksananya pendekatan partisipatif pada perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari.

Oleh karena itu, secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ mengapa dan bagaimana ikatan sesama petani dalam kelompok tani dapat menjadi basis pada proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota ?” Berdasarkan pertanyaan umum tersebut, dapat dirincikan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa dan bagaimana terbentuknya kelompok ikatan sesama petani di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Bagaimana proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari dilaksanakan dengan melibatkan kelompok ikatan sesama petani di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
3. Bagaimana hubungan antara ikatan anggota kelompok dengan partisipasinya pada proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari ?
4. Bagaimana ikatan sesama petani dapat memperbaiki proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Menjelaskan alasan dan proses terbentuknya kelompok ikatan sesama petani di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjelaskan proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari yang melibatkan kelompok ikatan sesama petani di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menjelaskan hubungan antara ikatan anggota kelompok dengan partisipasinya pada proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari.

4. Menjelaskan perbaikan yang dihasilkan oleh ikatan sesama petani pada proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Proposisi Penelitian

Proposisi dibangun untuk menetapkan jawaban sementara, dan menjadi arahan teoritis yang digunakan untuk membangun protokol penelitian. Protokol penelitian yaitu petunjuk praktis pengumpulan data yang harus diikuti oleh peneliti agar penelitian terfokus pada konteksnya (Yin, 2009). Penggunaan preposisi dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman atau arahan bagi peneliti agar lebih terfokus untuk dapat menjelaskan tujuan penelitian.

Dasar perumusan proposisi ini digunakan beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan penelitian, diantaranya adalah teori perencanaan partisipatif, perencanaan penyuluhan pertanian, partisipasi, kelompok tani, dan modal sosial terikat (*bonding social capital*). Melalui konsep dan teori tersebut dapat dideskripsikan dasar berpikir membangun proposisi penelitian ini, yaitu perencanaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, menuntut petani secara sadar dan mau terlibat aktif pada setiap proses perencanaan penyuluhan pertanian supaya program, kegiatan, metode dan materi penyuluhan pertanian yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani. Petani yang terlibat merupakan perwakilan dari kelompok tani yang pada umumnya saling terikat oleh kesamaan domisili atau hamparan lahan pertanian. Dalam hal ini, untuk membuat partisipasi petani lebih baik dalam setiap proses perencanaan penyuluhan pertanian, dimasukkan unsur *bonding social capital* (modal sosial terikat) sebagai pengikat antara anggota kelompok tani.

Alasan pemilihan *bonding social capital* sebagai pengikat anggota kelompok tani, adalah telah banyak terbukti dari kajian terdahulu yang menjelaskan modal sosial terikat dapat membuat partisipasi anggotanya lebih baik, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Liu, Qiaoming, Besser, Terry (2003); Brisson, Daniel; Usher, Charles L (2005); Fernandes, Marylin; Nichols, Laura (2002); Edward, Monica, Robert, (2009); Rustiadi at al (2011); Rijn at al, 2015; Pretty & Bharucha, (2015). Selain itu, secara teorinya masyarakat yang

berada pada kelompok ini memiliki kelebihan seperti berinteraksi secara intensif dan saling mendukung (Woolcock, 2000).

Berdasarkan deskripsi di atas, supaya penelitian ini dapat lebih fokus untuk menjawab tujuan penelitian, maka proposisi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “ Ikatan pertalian, baik pertalian *saparuik*, *sasuku*, *sapusako* maupun pertalian pertemanan akrab/persahabatan, *urang sumando* dalam kelompok tani dapat menjadikan partisipasi petani lebih baik untuk memperbaiki proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari ”, proposisi ini diajukan sebagai kesimpulan sementara yang menjadi dasar untuk melaksanakan penelitian (Ali, 2011).

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1) Kegunaan untuk teoritik :

Menambah pengetahuan untuk teori perencanaan partisipatif bahwa Ikatan pertalian, baik pertalian *saparuik*, *sasuku*, *sapusako* maupun pertalian pertemanan akrab/persahabatan, *urang sumando* dalam kelompok tani dapat menjadikan partisipasi petani lebih baik untuk memperbaiki proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari. Ikatan pertalian antara anggota kelompok tani menimbulkan interaksi aktif dan saling mendukung untuk kepentingan kelompok sebagai modal partisipasi petani dalam proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari.

2) Kegunaan praktis :

Melalui temuan dari penelitian ini, pemerintah dapat melakukan perbaikan proses perencanaan penyuluhan pertanian dengan memanfaatkan ikatan yang dimiliki oleh anggota kelompok tani. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan program dan kegiatan penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani. Implikasi lainnya dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan pertanian di nagari/desa.

3) Kegunaan untuk penulis:

Dapat menjadi sarana pembelajaran dan pendalaman keilmuan dibidang perencanaan partisipatif yang diterapkan pada proses perencanaan penyuluhan

pertanian nagari, dengan memanfaatkan modal sosial sebagai salah satu solusi permasalahan partisipasi petani.

4) Kegunaan untuk peneliti selanjutnya:

Sebagai sumber informasi dan dasar oleh peneliti selanjutnya yang berminat mendalami topik serupa atau mengembangkan temuan yang dihasilkan dari penelitian ini.

